

## BAB V

### ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KEGAGALAN ANIES BASWEDAN DALAM PENCALONAN PILKADA DKJ 2024

#### 5.1 Faktor Terjadinya Kegagalan Dalam Pencalonan Anies Baswedan Menjadi Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta 2024

##### 5.1.1 Pentingnya Koalisi Pada Politik di Indonesia

Koalisi partai politik memiliki peran krusial dalam sistem politik Indonesia yang menganut sistem presidensial dengan multipartai. Dalam konteks ini, koalisi menjadi sarana penting untuk memastikan stabilitas pemerintahan dan efektivitas pengambilan keputusan.

Salah satu alasan utama pentingnya koalisi adalah untuk membentuk pemerintahan yang stabil. Dengan banyaknya partai politik yang ada, tidak ada satu partai pun yang mampu meraih mayoritas mutlak di parlemen. Oleh karena itu, pembentukan koalisi menjadi solusi untuk mencapai dukungan mayoritas yang diperlukan dalam pengambilan keputusan legislatif. Selain itu, koalisi memungkinkan penyatuan berbagai visi dan program dari partai-partai yang berbeda. Hal ini penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih komprehensif dan inklusif, mencerminkan keragaman aspirasi masyarakat Indonesia. Koalisi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi fragmentasi politik. Dengan berkoalisi, partai-partai dapat menggabungkan kekuatan mereka, mengurangi potensi konflik, dan meningkatkan efisiensi dalam proses legislatif.

Dalam konteks pemilihan presiden, koalisi partai politik menjadi penting untuk memenuhi ambang batas pencalonan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 mensyaratkan partai atau gabungan partai memiliki minimal 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tanpa koalisi, banyak partai tidak dapat memenuhi syarat ini. Namun, koalisi di Indonesia sering kali bersifat pragmatis dan jangka pendek, tanpa didasarkan pada kesamaan ideologi atau platform politik. Hal ini dapat

menyebabkan ketidakstabilan dalam pemerintahan, terutama jika partai-partai anggota koalisi memiliki kepentingan yang berbeda atau bertentangan.

Pentingnya koalisi juga terlihat dalam upaya untuk menghindari dominasi satu partai dan memastikan adanya checks and balances dalam pemerintahan. Dengan adanya koalisi, kekuasaan tersebar dan pengambilan keputusan menjadi lebih demokratis. Koalisi juga dapat meningkatkan legitimasi pemerintahan. Dengan melibatkan berbagai partai dalam pemerintahan, keputusan yang diambil mencerminkan konsensus yang lebih luas, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Selain itu, koalisi memungkinkan partai-partai kecil untuk memiliki pengaruh dalam pemerintahan. Tanpa koalisi, suara dan aspirasi partai kecil mungkin terabaikan, tetapi melalui koalisi, mereka dapat berkontribusi dalam pengambilan Keputusan. Namun, koalisi yang dibentuk tanpa dasar ideologis yang kuat rentan terhadap perpecahan. Ketika kepentingan pragmatis tidak terpenuhi, partai-partai dapat dengan mudah meninggalkan koalisi, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.

Oleh karena itu, diperlukan pelembagaan koalisi yang lebih kuat, dengan aturan yang jelas mengenai pembentukan dan operasionalisasi koalisi. Hal ini untuk memastikan bahwa koalisi yang dibentuk tidak hanya bersifat sementara, tetapi memiliki landasan yang kokoh untuk mendukung pemerintahan yang efektif. Dalam praktiknya, koalisi juga berperan dalam penentuan kebijakan publik. Dengan adanya koalisi, kebijakan yang dihasilkan merupakan hasil kompromi dari berbagai partai, sehingga lebih mewakili kepentingan masyarakat yang beragam. Koalisi juga membantu dalam mengonsolidasikan demokrasi. Dengan bekerja sama, partai-partai belajar untuk berkompromi dan mencari solusi bersama, yang merupakan esensi dari proses demokrasi.

Namun, tantangan dalam koalisi tidak dapat diabaikan. Perbedaan ideologi, kepentingan, dan tujuan antara partai-partai anggota koalisi dapat menimbulkan konflik internal yang berpotensi menghambat kinerja pemerintahan. Oleh karena itu, penting bagi partai-partai politik di Indonesia untuk membangun koalisi yang didasarkan pada kesamaan visi dan misi, serta komitmen untuk bekerja sama demi

kepentingan nasional. Dengan demikian, koalisi dapat berfungsi secara efektif dan berkontribusi pada stabilitas serta kemajuan negara. Secara keseluruhan, koalisi partai politik merupakan elemen penting dalam sistem politik Indonesia. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, dengan pendekatan yang tepat, koalisi dapat menjadi sarana untuk mencapai pemerintahan yang stabil, efektif, dan demokratis.

### 5.1.2 Kegagalan Koalisi Partai

Kegagalan koalisi partai politik sering kali disebabkan oleh perbedaan ideologi dan platform antarpartai yang berkoalisi. Meskipun tujuan utama koalisi adalah untuk mencapai kekuasaan, perbedaan mendasar dalam visi dan misi partai dapat menimbulkan konflik internal yang sulit diselesaikan. Sebagai contoh, pada era reformasi, banyak partai mengalami perpecahan akibat perbedaan ideologi yang tajam. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa kesamaan ideologis yang kuat, koalisi rentan terhadap perpecahan. Selain perbedaan ideologi, pragmatisme politik juga menjadi faktor penyebab kegagalan koalisi. Partai-partai sering kali membentuk koalisi berdasarkan kepentingan jangka pendek tanpa mempertimbangkan kesesuaian visi dan misi. Koalisi semacam ini cenderung rapuh dan mudah pecah ketika kepentingan pragmatis tidak terpenuhi. Sebagai contoh, koalisi yang dibentuk menjelang pemilihan presiden sering kali bersifat sementara dan berorientasi pada kemenangan semata.

Faksionalisme atau pembentukan faksi-faksi dalam partai juga berkontribusi pada kegagalan koalisi. Faksi-faksi ini sering kali memiliki agenda dan kepentingan sendiri yang berbeda dengan kepentingan koalisi secara keseluruhan. Akibatnya, terjadi konflik internal yang dapat melemahkan soliditas koalisi. Fenomena ini banyak terjadi pada partai-partai di Indonesia pasca-reformasi. Kurangnya pelembagaan partai politik menjadi faktor lain yang menyebabkan kegagalan koalisi. Partai yang belum terlembaga dengan baik cenderung tidak memiliki struktur dan mekanisme yang solid untuk mengelola koalisi. Hal ini mengakibatkan koalisi menjadi tidak efektif dan rentan terhadap konflik. Penelitian menunjukkan bahwa partai-partai baru sering kali gagal membangun pelembagaan yang kuat, sehingga koalisi yang dibentuk tidak berjalan dengan baik.

Koalisi yang dibentuk tanpa kesamaan visi dan program juga rentan mengalami kegagalan. Koalisi semacam ini biasanya hanya berorientasi pada pembagian kekuasaan tanpa mempertimbangkan kesesuaian program kerja. Akibatnya, ketika menghadapi isu-isu strategis, partai-partai dalam koalisi tidak memiliki pandangan yang sama, yang akhirnya memicu konflik. Hal ini sering terjadi dalam sistem presidensial di Indonesia, di mana koalisi partai politik belum menitikberatkan pada kesamaan visi dan program. Dominasi kepentingan elit partai dalam pengambilan keputusan koalisi juga menjadi penyebab kegagalan. Keputusan sering kali diambil oleh segelintir elit tanpa melibatkan struktur partai secara keseluruhan. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan kader dan anggota partai, yang pada akhirnya dapat merusak soliditas koalisi. Sebagai contoh, konflik internal di beberapa partai pasca-Pilpres 2014 disebabkan oleh perbedaan sikap elit partai dalam mendukung koalisi pemerintahan.

Kurangnya komunikasi dan koordinasi antarpartai dalam koalisi juga menjadi faktor penting dalam kegagalan koalisi. Tanpa komunikasi yang efektif, miskomunikasi dan kesalahpahaman mudah terjadi, yang dapat memicu konflik dan perpecahan. Koordinasi yang lemah juga menghambat implementasi program koalisi, sehingga tujuan bersama sulit tercapai. Penelitian menunjukkan bahwa dinamika koalisi partai politik di Indonesia sering kali diwarnai oleh kurangnya komunikasi dan koordinasi yang efektif. Perbedaan kepentingan antara partai-partai dalam koalisi sering kali menjadi sumber konflik. Setiap partai memiliki agenda dan prioritas masing-masing, yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan koalisi secara keseluruhan. Ketika kepentingan ini bertabrakan, konflik internal tidak dapat dihindari, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kegagalan koalisi. Sebagai contoh, perbedaan kepentingan dalam mendukung calon presiden tertentu dapat memicu konflik dalam koalisi.

Koalisi yang dibentuk tanpa dasar ideologis yang kuat cenderung rapuh dan mudah pecah. Koalisi semacam ini biasanya hanya berorientasi pada pembagian kekuasaan tanpa mempertimbangkan kesesuaian ideologi. Akibatnya, ketika menghadapi isu-isu strategis, partai-partai dalam koalisi tidak memiliki pandangan yang sama, yang akhirnya memicu konflik. Penelitian menunjukkan bahwa koalisi partai politik di Indonesia sering kali tidak didasarkan pada kesamaan ideologi,

sehingga rentan terhadap perpecahan. Kurangnya komitmen dari partai-partai dalam koalisi juga menjadi faktor penyebab kegagalan. Tanpa komitmen yang kuat, partai-partai cenderung tidak serius dalam menjalankan kesepakatan koalisi. Hal ini mengakibatkan implementasi program koalisi menjadi tidak efektif, yang pada akhirnya merusak kepercayaan antarpartai dan menyebabkan perpecahan. Sebagai contoh, kurangnya komitmen dalam mendukung calon presiden yang disepakati dapat memicu konflik dalam koalisi. Perbedaan dalam struktur organisasi dan budaya partai juga dapat menyebabkan kegagalan koalisi.

### **5.1.3 Faktor Terjadinya Kegagalan Pencalonan Anies Baswedan Menurut Teori Koalisi Geoffrey Pridham**

Dalam konteks Pilkada DKJ 2024, kegagalan pencalonan Anies Baswedan dapat dianalisis menggunakan teori koalisi Geoffrey Pridham. Menurut Pridham, koalisi politik sering kali terbentuk berdasarkan kalkulasi rasional para aktor politik yang ingin memaksimalkan peluang mereka dalam pemerintahan. Dalam kasus Anies Baswedan, ketidakmampuannya untuk mendapatkan dukungan dari koalisi yang solid menjadi faktor utama dalam kegagalannya maju sebagai calon gubernur.

Salah satu hambatan utama yang dihadapi Anies Baswedan adalah kecenderungan partai politik untuk lebih mengutamakan kepentingan jangka panjang dalam pemerintahan pusat dibandingkan mendukung kandidat yang belum tentu menang. Menurut Bapak Selamat Ginting, "Pilihan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjadi prioritas daripada mengusung Anies Baswedan yang menjadi simbol oposisi. Politik butuh kepastian, termasuk kepastian mendapatkan kursi menteri." (Hasil Wawancara Dengan Bapak Selamat Ginting 29 Desember 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan pragmatis partai politik lebih dominan dibandingkan faktor elektabilitas Anies Baswedan.

Teori Pridham juga menjelaskan bahwa koalisi politik sering kali bersifat sementara dan insidental. Hal ini terbukti dalam kasus Anies, di mana partai-partai yang awalnya mendukungnya kemudian menarik diri dan bergabung dengan koalisi yang lebih besar untuk mengamankan posisi mereka di pemerintahan pusat. Pergeseran ini mencerminkan bahwa partai-partai lebih memilih stabilitas dibandingkan mengambil risiko dengan mendukung kandidat oposisi.

Dinamika internal dalam partai politik juga menjadi faktor yang menghambat pencalonan Anies Baswedan. Beberapa partai yang sebelumnya mendukungnya mengajukan syarat tambahan yang sulit dipenuhi, seperti PKS yang meminta tambahan empat kursi dari partai lain agar memenuhi ambang batas pencalonan. Ketika syarat ini tidak terpenuhi, mereka akhirnya bergabung dengan KIM Plus. Menurut teori Pridham, koalisi yang dibangun atas dasar pragmatisme politik sering kali tidak bertahan lama. Dalam kasus Anies, koalisi yang diharapkan mendukungnya pecah karena kepentingan politik jangka panjang dari masing-masing partai lebih diutamakan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam politik, stabilitas dan kepastian sering kali lebih diprioritaskan dibandingkan faktor elektabilitas seorang kandidat.

Selain faktor internal, faktor eksternal seperti tekanan dari pemerintah pusat juga berperan dalam menggagalkan pencalonan Anies Baswedan. Bapak Selamat Ginting mengungkapkan, "Konflik kepentingannya, siapa pun yang menjadi Presiden tentu saja tidak ingin Gubernur Jakarta diduduki tokoh yang berseberangan atau tokoh oposisi terhadap pemerintahan pusat." (Hasil Wawancara Dengan Bapak Selamat Ginting 29 Desember 2024, n.d.) Tekanan ini mencerminkan bagaimana elite politik nasional dapat memengaruhi dinamika politik daerah. Dinamika politik yang terjadi dalam proses pencalonan Anies menunjukkan bahwa partai politik lebih cenderung mengutamakan keuntungan strategis jangka panjang dibandingkan mendukung individu yang memiliki elektabilitas tinggi. Hal ini sejalan dengan teori Pridham yang menekankan bahwa pembentukan koalisi didasarkan pada kalkulasi politik yang rasional. Dalam konteks Pilkada DKJ, faktor ekonomi juga turut memengaruhi keputusan partai politik. Partai-partai yang awalnya mendukung Anies menyadari bahwa tanpa dukungan finansial yang kuat, peluang kemenangan Anies menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, mereka lebih memilih bergabung dengan koalisi yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya ekonomi. Selain itu, ideologi partai juga menjadi salah satu faktor penghambat. PDIP, misalnya, memiliki aturan ketat bahwa kandidat yang mereka usung harus berasal dari kader partai. Hal ini semakin mempersempit ruang bagi Anies untuk mendapatkan dukungan dari partai besar.

Dalam teori Pridham, stabilitas koalisi sangat bergantung pada hubungan antarpartai yang membentuknya. Ketika partai-partai dalam koalisi tidak memiliki visi yang sama atau memiliki kepentingan yang berbeda, maka koalisi tersebut cenderung rapuh. Hal ini yang terjadi dalam koalisi pendukung Anies Baswedan, di mana masing-masing partai lebih fokus pada kepentingan mereka sendiri dibandingkan kepentingan bersama. Dalam beberapa kasus, koalisi yang tidak stabil dapat menyebabkan konflik internal yang semakin memperlemah posisi kandidat yang diusung. Dalam kasus Anies, ketidaksatuan dalam koalisi pendukungnya membuatnya kehilangan kesempatan untuk maju sebagai calon gubernur DKI 2024. Keputusan partai-partai politik untuk bergabung dengan KIM Plus menunjukkan bahwa dalam politik, kepentingan pragmatis lebih dominan dibandingkan kesetiaan terhadap kandidat tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa koalisi politik lebih sering didasarkan pada kalkulasi keuntungan dibandingkan pada kesamaan visi atau ideologi.

Menurut Usamah, setelah Pilpres 2024 selesai, koalisi yang sebelumnya solid kembali ke titik nol dan harus bernegosiasi ulang dalam Pilkada DKI. Banyak partai akhirnya lebih memilih bergabung dengan koalisi yang lebih besar untuk mengamankan posisi mereka di pemerintahan pusat dibandingkan mempertahankan dukungan terhadap Anies.

Salah satu faktor utama yang membuat partai-partai berbalik arah adalah tekanan dari rezim yang berkuasa. Bapak Usamah menjelaskan bahwa cara-cara rezim dalam menekan partai sangat efektif, sehingga banyak partai yang tadinya bersahabat dengan Anies akhirnya memilih jalan lain. (Hasil Wawancara Dengan Bapak Usamah Abdul Aziz 16 Desember 2024). Hal ini sesuai dengan teori Pridham yang menyatakan bahwa stabilitas koalisi sangat bergantung pada keseimbangan kekuatan antarpartai dan tekanan dari pihak eksternal. Dalam kasus Anies, meskipun ia memiliki elektabilitas tinggi, faktor kompromi antarpartai dan kepentingan jangka panjang lebih diutamakan oleh partai politik dibandingkan sekadar memenangkan satu kandidat. Dinamika politik yang terjadi dalam proses pencalonan Anies menunjukkan bahwa partai politik lebih cenderung mengutamakan keuntungan strategis dibandingkan loyalitas terhadap kandidat tertentu. Hal ini sejalan dengan teori Pridham yang menekankan bahwa

pembentukan koalisi didasarkan pada kalkulasi politik yang rasional. Peran independensi Anies dalam pengambilan keputusan juga menjadi faktor yang membuatnya sulit mendapatkan dukungan penuh dari partai politik. Usamah menegaskan bahwa Anies bukan bagian dari partai politik mana pun, sehingga ia tidak memiliki kuasa untuk menentukan arah koalisi sebagaimana ketua partai. Ini menyebabkan lemahnya kohesi dalam barisan pendukungnya.

Secara keseluruhan, kegagalan Anies Baswedan dalam pencalonan Pilkada DKJ 2024 dapat dijelaskan melalui teori koalisi Geoffrey Pridham. Faktor utama yang berkontribusi terhadap kegagalannya adalah pergeseran dukungan dari partai-partai yang awalnya mendukungnya ke koalisi yang lebih besar demi mengamankan kepentingan politik mereka. Kegagalan ini juga menunjukkan bahwa dalam politik, koalisi bukanlah sesuatu yang permanen. Koalisi dapat berubah sesuai dengan dinamika politik yang terjadi, seperti yang dijelaskan dalam teori Pridham bahwa pembentukan koalisi lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan pragmatis dibandingkan faktor ideologis. Dalam konteks demokrasi Indonesia, kasus Anies Baswedan menjadi contoh bagaimana dinamika koalisi partai dapat memengaruhi jalannya proses pencalonan kepala daerah. Hal ini menunjukkan bahwa popularitas seorang kandidat tidak selalu menjamin keberhasilannya dalam kontestasi politik. Faktor ekonomi, ideologi, dan kepentingan politik menjadi variabel penting dalam menentukan keberlanjutan sebuah koalisi. Dalam kasus Anies, ketidakmampuannya untuk mengakomodasi kepentingan partai-partai pendukungnya menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kegagalannya.

Setelah kegagalan pencalonan yang dilakukan oleh pencalonan PKS, NASDEM, dan PKB, Anies Baswedan sempat ingin juga di calonkan oleh PDIP, Tetapi terjadi kegagalan lagi, hal tersebut di akibatkan PDIP sebagai partai besar memiliki kepentingan strategis untuk mempertahankan pengaruhnya di tingkat nasional dan daerah. Meskipun Anies Baswedan memiliki elektabilitas tinggi, PDIP lebih memilih untuk mengusung kandidat yang sejalan dengan visi dan misi partai, serta memiliki loyalitas yang kuat terhadap struktur internal partai. Hal ini sesuai dengan teori Pridham yang menyatakan bahwa koalisi partai lebih cenderung

memilih kandidat yang dapat memberikan keuntungan jangka panjang bagi partai, bukan hanya sekadar popularitas.

PDIP memiliki aturan ketat bahwa kandidat yang diusung harus berasal dari kader partai. Anies Baswedan, meskipun populer, bukanlah kader PDIP. Hal ini menimbulkan konflik internal di dalam partai, di mana beberapa elite PDIP lebih memilih kandidat yang berasal dari dalam partai untuk menjaga stabilitas dan loyalitas. Menurut Pridham, koalisi yang dibangun atas dasar pragmatisme politik sering kali tidak bertahan lama jika ada konflik internal yang tidak terselesaikan.

Dengan memahami teori koalisi Pridham, kita dapat melihat bagaimana faktor-faktor struktural dalam sistem politik Indonesia dapat memengaruhi dinamika pencalonan dalam pemilihan kepala daerah. Kasus Anies Baswedan memberikan wawasan bahwa politik bukan hanya soal elektabilitas, tetapi juga soal strategi dan negosiasi yang matang dalam membangun koalisi. Pada akhirnya, dinamika koalisi politik dalam Pilkada DKJ 2024 mencerminkan bagaimana kepentingan elite politik bekerja dalam sistem demokrasi. Meskipun Anies memiliki elektabilitas tinggi, faktor koalisi dan kepentingan elite lebih menentukan hasil akhir pencalonannya. Dengan demikian, teori koalisi Geoffrey Pridham dapat digunakan sebagai kerangka analisis yang relevan untuk memahami mengapa seorang kandidat dengan elektabilitas tinggi bisa mengalami kegagalan dalam proses pencalonan politik.

#### **5.1.4 Pengaruh Elite Politik Dalam Menentukan Calon Kepala Daerah**

Elite partai politik memiliki pengaruh signifikan dalam proses pencalonan kepala daerah di Indonesia. Peran mereka mencakup seleksi kandidat, pembentukan koalisi, hingga strategi pemenangan dalam pemilihan kepala daerah. Sebagai pengambil keputusan utama, elite partai menentukan arah dan kebijakan partai dalam kontestasi politik lokal. Hal ini menunjukkan betapa sentralnya peran mereka dalam menentukan calon yang akan diusung oleh partai.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah serentak yang dimulai sejak 2015, peran ketua umum partai politik semakin menguat. Keputusan akhir mengenai pencalonan sering kali berada di tangan ketua umum, yang mempertimbangkan berbagai faktor sebelum memberikan persetujuan. Proses ini menunjukkan

sentralisasi kekuasaan dalam struktur partai politik di Indonesia. Partai politik memiliki fungsi utama dalam melakukan rekrutmen politik, yaitu menyeleksi dan mencalonkan individu yang dianggap layak untuk posisi kepala daerah. Melalui proses ini, partai berperan sebagai filter untuk memastikan hanya kandidat yang sesuai dengan visi dan misi partai yang diusung. Namun, dalam praktiknya, proses rekrutmen ini sering kali dipengaruhi oleh kepentingan elite partai.

Selain itu, partai politik juga memiliki peran dalam memberikan legalitas kepada calon yang diusung. Surat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai menjadi syarat mutlak bagi pasangan calon untuk dapat maju dalam pemilihan kepala daerah melalui jalur partai politik. Hal ini menegaskan kontrol elite partai dalam menentukan siapa yang berhak maju sebagai calon kepala daerah.

Namun, dominasi elite partai dalam proses pencalonan kepala daerah dapat menimbulkan masalah, seperti munculnya politik dinasti. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-XIII/2015 yang membatalkan larangan politik dinasti, sejumlah calon dari kerabat petahana maju dalam pilkada. Hal ini menunjukkan bahwa proses rekrutmen politik yang tidak demokratis dapat membuka peluang bagi terbentuknya dinasti politik. Praktik politik dinasti ini dapat berdampak negatif pada demokrasi, karena kontrol dan keseimbangan dalam pemerintahan menjadi lemah. Selain itu, hal ini juga membuka peluang bagi terbentuknya oligarki politik, di mana kekuasaan hanya berputar di kalangan elite tertentu. Untuk itu, diperlukan model rekrutmen partai politik yang lebih demokratis untuk mencegah terbentuknya dinasti politik.

Di sisi lain, partai politik juga berperan dalam membentuk koalisi untuk memenangkan pemilihan kepala daerah. Pertimbangan dalam membentuk koalisi melibatkan kalkulasi politik yang kompleks, termasuk mempertimbangkan kekuatan masing-masing partai dan peluang kemenangan. Elite partai memainkan peran kunci dalam proses ini, menentukan arah koalisi dan strategi kemenangan. Namun, sentralisasi kekuasaan di tangan elite partai dapat menghambat proses kaderisasi dan regenerasi dalam partai. Kader-kader potensial mungkin enggan untuk aktif dalam partai jika melihat bahwa keputusan-keputusan penting hanya ditentukan oleh segelintir elite. Hal ini dapat berdampak pada menurunnya kualitas

kepemimpinan di tingkat lokal. Selain itu, dominasi elite partai dalam proses pencalonan juga dapat mengurangi partisipasi publik dalam politik. Masyarakat mungkin merasa bahwa pilihan mereka terbatas pada kandidat yang ditentukan oleh elite partai, sehingga menurunkan kepercayaan terhadap proses demokrasi. Untuk itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses pencalonan.

Untuk mengatasi masalah ini, partai politik perlu mengembangkan mekanisme rekrutmen yang lebih terbuka dan demokratis. Hal ini termasuk melibatkan kader di tingkat lokal dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi kader potensial untuk maju sebagai calon kepala daerah. Dengan demikian, partai dapat memastikan bahwa kandidat yang diusung benar-benar mewakili aspirasi masyarakat.

Selain itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat untuk mencegah terbentuknya dinasti politik. Misalnya, dengan menetapkan batasan bagi kerabat petahana untuk maju dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan adil dan tidak didominasi oleh kelompok tertentu. Peran media dan masyarakat sipil juga penting dalam mengawasi proses pencalonan kepala daerah. Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan dapat mencegah praktik-praktik yang tidak demokratis dan memastikan bahwa kandidat yang diusung benar-benar berkualitas dan mewakili kepentingan publik. Pendidikan politik bagi masyarakat juga perlu ditingkatkan agar mereka lebih kritis dalam memilih calon kepala daerah. Dengan pemilih yang lebih cerdas, diharapkan dapat mendorong partai politik untuk lebih selektif dan demokratis dalam proses rekrutmen dan pencalonan.

Secara keseluruhan, meskipun elite partai politik memiliki peran penting dalam proses pencalonan kepala daerah, diperlukan mekanisme yang memastikan bahwa peran tersebut tidak menghambat proses demokrasi. Dengan demikian, proses pencalonan dapat berjalan dengan lebih transparan, partisipatif.

### 5.1.5 Faktor Terjadinya Kegagalan Pencalonan Anies Baswedan Menurut Teori Elite C. Wright Mills

Kegagalan Anies Baswedan dalam pencalonannya sebagai Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) 2024 dapat dijelaskan melalui perspektif teori elite yang dikemukakan oleh C. Wright Mills. Menurut Mills, elite kekuasaan terdiri dari sekelompok kecil individu yang mendominasi institusi politik, ekonomi, dan militer. Dalam konteks pencalonan Anies, faktor utama yang menghambatnya berasal dari dinamika elite politik yang lebih mengutamakan stabilitas kekuasaan mereka dibandingkan dengan mendukung seorang kandidat yang tidak mereka kendalikan sepenuhnya.

Salah satu hambatan utama yang dihadapi Anies adalah keinginan partai-partai politik untuk mendapatkan jaminan posisi strategis dalam pemerintahan pusat. Bapak Selamat Ginting menjelaskan bahwa partai politik lebih memilih untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang dipimpin oleh Prabowo Subianto karena adanya kepastian mendapatkan kursi menteri dalam kabinet. Dalam wawancaranya, beliau menyatakan, *"Politik butuh kepastian, termasuk kepastian mendapatkan kursi menteri. Posisi menteri lebih menggiurkan ketimbang mendukung Anies maju pada Pilkada 2024."* (Hasil Wawancara Dengan Bapak Selamat Ginting 29 Desember 2024, n.d.) Hal ini menunjukkan bahwa elite partai lebih mengutamakan keuntungan jangka panjang di pemerintahan pusat dibandingkan dengan mendukung pencalonan Anies.

Selain itu, faktor ideologis juga menjadi penghalang bagi Anies untuk mendapatkan dukungan dari partai besar seperti PDI Perjuangan. Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa calon yang diusung partainya haruslah kader partai, bukan individu yang berada di luar struktur kepartaian. Ini sesuai dengan teori Mills yang menyebutkan bahwa elite politik selalu berusaha menjaga eksklusivitas kekuasaan mereka agar tetap terkendali. Menurut Bapak Selamat Ginting, *"Megawati berusaha menunjukkan keberadaan partai politik sebagai jalan yang tepat bagi siapa pun untuk ikut kontestasi politik di segala level pemilihan."* Oleh karena itu, absennya dukungan dari PDIP semakin mempersempit peluang Anies untuk maju dalam Pilkada DKJ 2024.

Konflik kepentingan di antara elite politik juga berperan dalam menggagalkan pencalonan Anies. Menurut Mills, elite memiliki kepentingan bersama dalam mempertahankan dominasi mereka terhadap sistem politik. Dalam konteks Pilkada DKJ, elite partai politik lebih memilih mengamankan posisi mereka di pemerintahan pusat dibandingkan mengambil risiko mendukung Anies yang merupakan simbol oposisi. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Selamat Ginting, *"Konflik kepentingannya, siapa pun yang menjadi Presiden tentu saja tidak ingin Gubernur Jakarta diduduki tokoh yang berseberangan atau tokoh oposisi terhadap pemerintahan pusat."* Ini menunjukkan bahwa faktor kepentingan elite nasional juga turut mempengaruhi dinamika politik di tingkat daerah.

Selain tekanan dari elite partai politik, tekanan dari pemerintah pusat juga menjadi faktor eksternal yang menghambat pencalonan Anies. Bapak Selamat Ginting mengindikasikan bahwa bisa saja terdapat tekanan dari Presiden Jokowi terhadap partai-partai politik agar tidak mendukung Anies. Dalam teorinya, Mills menjelaskan bahwa elite politik sering kali bekerja sama dengan elite ekonomi dan militer untuk mempertahankan status quo. Dengan adanya tekanan dari pemerintah pusat, partai-partai yang sebelumnya mendukung Anies akhirnya memilih untuk bergabung dengan KIM Plus demi mendapatkan perlindungan politik dan akses ke sumber daya negara.

Tidak hanya faktor eksternal, faktor internal dalam koalisi pendukung Anies juga menjadi penghalang. PKS, sebagai salah satu partai yang awalnya mendukung Anies, meminta tambahan empat kursi dari partai lain agar memenuhi ambang batas pencalonan. Namun, hingga tenggat waktu yang ditentukan, Anies gagal mendapatkan tambahan kursi tersebut, menyebabkan PKS akhirnya bergabung dengan KIM Plus. Dalam wawancaranya, Bapak Selamat Ginting menyebutkan, *"PKS awalnya mendukung Anies, namun meminta tambahan empat kursi. Ketika tidak terpenuhi, mereka akhirnya beralih ke KIM Plus."* Ini menunjukkan bahwa ketidaksatuan dalam koalisi dapat menghambat peluang seorang kandidat dalam kontestasi politik.

Dinamika internal di dalam partai-partai pendukung Anies juga menunjukkan adanya perbedaan kepentingan yang sulit disatukan. Masing-masing

partai politik memiliki agenda sendiri untuk menyelamatkan eksistensi mereka di kancah nasional. Bapak Selamat Ginting mengungkapkan, *"Masing-masing partai politik yang sebelumnya mengusung Anies memiliki kepentingan politik yang berbeda, baik PKS, PKB, maupun Nasdem. Mereka lebih fokus pada penyelamatan partai di tingkat nasional daripada sekadar membantu Anies Baswedan."* Perbedaan kepentingan ini semakin memperumit upaya membangun koalisi yang solid untuk mendukung pencalonan Anies.

Lebih jauh, teori Mills juga menjelaskan bagaimana elite ekonomi dapat memengaruhi pencalonan politik. Dalam konteks Pilkada DKJ, Anies dianggap tidak memiliki sumber daya ekonomi yang cukup besar untuk menopang kampanyenya dibandingkan kandidat lain yang mendapatkan dukungan dari elite bisnis. Partai politik yang mendukung Anies pun menyadari bahwa tanpa sokongan finansial yang kuat, peluang kemenangan Anies menjadi lebih kecil. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Selamat Ginting, *"Tidak ada jaminan bahwa Anies Baswedan akan menang dan dapat memberikan sumber daya ekonomi bagi partai-partai politik tersebut."* Hal ini semakin memperjelas bagaimana faktor ekonomi turut berperan dalam strategi politik yang diambil oleh partai-partai pendukung.

Dari perspektif Bapak Usamah Abdul Aziz, dinamika yang terjadi dalam pencalonan Anies Baswedan juga sangat dipengaruhi oleh cara rezim politik saat ini mengelola partai-partai pendukung. Menurutnya, banyak partai yang awalnya mendukung Anies akhirnya berbelok arah akibat tekanan politik dan strategi kekuasaan yang diterapkan oleh elite pemerintah. Dalam wawancaranya, ia menyatakan, *"Cara-cara rezim untuk mengekang para partai cukup sadis, dengan ancaman dan segala cara yang dilakukan."* Ini menunjukkan bagaimana elite penguasa menggunakan pengaruhnya untuk membentuk peta politik sesuai dengan kepentingan mereka.

Bapak Usamah Abdul Aziz juga menyoroti bagaimana ketua partai memiliki kuasa penuh dalam menentukan arah dukungan politik. Dalam konteks ini, kepentingan ketua partai tidak selalu sejalan dengan kebutuhan kader atau konstituen mereka. Menurutnya, *"Elite politik inilah yang menentukan siapa akan mendukung siapa, dan siapa akan didukung siapa."* (Hasil Wawancara Dengan

Bapak Usamah Abdul Aziz 16 Desember 2024, n.d.) Hal ini sesuai dengan teori Mills yang menekankan bahwa elite politik sering kali bertindak atas dasar kepentingan eksklusif mereka sendiri tanpa mempertimbangkan aspirasi publik secara luas.

Selain faktor eksternal, faktor internal dalam koalisi pendukung Anies juga menjadi penghambat. Dalam wawancara, Usamah menyebutkan bahwa ketidakmampuan menjaga soliditas dalam koalisi menyebabkan lemahnya basis dukungan politik Anies. *"Koalisi yang dibangun pada saat Pilpres tidak bisa terus dipertahankan dalam Pilkada."* Ini memperlihatkan bagaimana strategi koalisi yang tidak terjaga dapat berujung pada kegagalan dalam pencalonan. Dinamika dalam partai-partai yang awalnya mendukung Anies menunjukkan bahwa mereka lebih memilih untuk menyelamatkan kepentingan jangka panjang mereka dibanding mempertahankan dukungan bagi Anies. Usamah menekankan bahwa *"Banyak partai yang akhirnya memilih berbalik arah karena tekanan dan kepentingan strategis jangka panjang."* Ini menegaskan bahwa dalam sistem politik yang didominasi elite, keputusan yang diambil sering kali didasarkan pada kalkulasi kepentingan daripada loyalitas terhadap kandidat tertentu. Selain itu, faktor media juga memainkan peran dalam pembentukan opini publik terhadap pencalonan Anies. Banyak media yang dikendalikan oleh elite politik lebih memilih untuk memberikan eksposur kepada kandidat yang lebih menguntungkan bagi kepentingan mereka.

Dalam beberapa kasus, pengaruh elite politik tidak hanya memengaruhi pencalonan, tetapi juga menciptakan persepsi negatif terhadap kandidat yang dianggap sebagai ancaman terhadap dominasi mereka. Kebijakan administratif dan regulasi juga dapat digunakan sebagai alat untuk menghambat pencalonan lawan politik. Sejumlah aturan dapat diterapkan dengan cara yang menguntungkan kandidat tertentu. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor di atas, kegagalan pencalonan Anies Baswedan dapat dilihat sebagai hasil dari dinamika elite politik yang bekerja untuk menjaga stabilitas dan kepentingan mereka. Dalam teori Mills, elite kekuasaan selalu mencari cara untuk mempertahankan dominasi mereka melalui kontrol terhadap partai politik, pemerintahan, dan sumber daya ekonomi. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun seorang kandidat memiliki elektabilitas

tinggi, tanpa dukungan dari elite yang berkuasa, pencalonan tersebut tetap dapat mengalami kegagalan.

Setelah kegagalan pencalonan yang dilakukan oleh pencalonan PKS, NASDEM, dan PKB, Anies Baswedan sempat ingin juga di calonkan oleh PDIP, Tetapi terjadi kegagalan lagi, hal tersebut di akibatkan oleh Elite PDIP, terutama Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah partai. Megawati menegaskan bahwa calon yang diusung harus berasal dari kader partai, bukan dari luar. Hal ini menunjukkan bahwa elite PDIP lebih memilih untuk menjaga eksklusivitas kekuasaan mereka dengan mengusung kandidat yang dapat dikendalikan sepenuhnya. Anies Baswedan, meskipun populer, dianggap tidak memiliki loyalitas yang kuat terhadap struktur internal PDIP.

Elite elite yang mungkin terlibat dalam terjadinya kegagalan dalam pencalonan Anies Baswedan menjadi calon gubernur pada pilkada DKJ 2024

Pertama, Jokowi dan pemerintahan pusat memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa gubernur DKI Jakarta adalah figur yang sejalan dengan kebijakan nasional. Sebagai ibu kota negara, Jakarta memiliki peran strategis dalam mendukung agenda pemerintahan pusat. Oleh karena itu, Jokowi dan elite pemerintahannya cenderung mendukung kandidat yang dapat dikendalikan dan tidak menimbulkan konflik dengan kebijakan nasional.

Kedua, Megawati dan PDIP lebih memilih untuk mengusung kandidat yang dapat dikendalikan sepenuhnya oleh partai. Megawati, sebagai ketua umum PDIP, menegaskan bahwa calon yang diusung harus berasal dari kader partai. Hal ini menunjukkan bahwa PDIP lebih mengutamakan kepentingan partai daripada mendukung figur independen seperti Anies Baswedan, meskipun elektabilitasnya tinggi.

Ketiga, Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju (KIM) berusaha untuk mengkonsolidasikan kekuatan politik mereka dengan menarik dukungan partai-partai yang awalnya mendukung Anies. Dengan menawarkan posisi strategis dalam pemerintahan, Prabowo berhasil menarik partai-partai seperti PKS, NasDem, dan

PKB untuk bergabung dengan KIM, sehingga Anies kehilangan dukungan yang diperlukan untuk maju dalam Pilkada.

Selain itu, elite ekonomi dan media juga memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa kandidat yang terpilih adalah figur yang dapat melindungi kepentingan mereka. Elite ekonomi cenderung mendukung kandidat yang memiliki akses ke sumber daya finansial dan jaringan bisnis yang kuat, sementara media yang dikendalikan oleh elite politik dapat memengaruhi opini publik dengan memberikan eksposur yang lebih besar kepada kandidat tertentu.

Dengan memahami dinamika ini, kita dapat melihat bahwa kegagalan Anies Baswedan bukan hanya disebabkan oleh faktor elektabilitas, tetapi juga oleh kepentingan elite politik yang bermain di balik layar. Teori elite C. Wright Mills memberikan kerangka kerja yang tepat untuk menganalisis bagaimana kepentingan elite politik dapat memengaruhi proses pencalonan dan hasil pemilihan.

#### **5.1.6 Terjadinya Konflik Kepentingan Dalam Proses Pencalonan Anies Baswedan**

Dalam proses pencalonan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI 2024, terjadi konflik kepentingan yang cukup kompleks, sebagaimana dijelaskan oleh Ralf Dahrendorf dalam teori konflik kepentingannya. Konflik ini tidak hanya terjadi antara partai-partai politik dalam koalisi, tetapi juga dengan elite politik nasional yang memiliki kepentingan tertentu dalam peta kekuasaan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Selamat Ginting, "Masing-masing partai politik yang sebelumnya mengusung Anies memiliki kepentingan politik yang berbeda, baik PKS, PKB, maupun Nasdem. Mereka lebih fokus pada penyelamatan partai di tingkat nasional daripada sekadar membantu Anies Baswedan." (Hasil Wawancara Dengan Bapak Selamat Ginting 29 Desember 2024, n.d.) Kutipan ini menunjukkan bahwa tidak ada kesatuan tujuan dalam koalisi pendukung Anies, yang akhirnya menghambat pencalonannya.

Konflik kepentingan dalam koalisi terjadi karena setiap partai memiliki agenda politik masing-masing. Dalam perspektif Dahrendorf, struktur sosial yang berbeda antara partai-partai dalam koalisi menyebabkan ketidakseimbangan kekuasaan dan kepentingan. Meskipun Anies memiliki elektabilitas tinggi, partai-

partai tersebut lebih memilih untuk berkoalisi dengan pihak yang dapat menjamin stabilitas politik mereka. Hal ini menunjukkan bahwa dalam politik, kepentingan pribadi dan partai sering kali lebih dominan dibandingkan dengan kepentingan calon yang diusung. Selain konflik internal dalam koalisi, tekanan dari elite politik nasional juga menjadi faktor yang mempengaruhi kegagalan pencalonan Anies. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Selamat Ginting, "Konflik kepentingannya, siapa pun yang menjadi Presiden tentu saja tidak ingin Gubernur Jakarta diduduki tokoh yang berseberangan atau tokoh oposisi terhadap pemerintahan pusat." Ini mencerminkan bagaimana kepentingan elite nasional dapat menghambat pencalonan seorang kandidat demi menjaga stabilitas kekuasaan mereka sendiri.

Menurut teori Dahrendorf, konflik kepentingan terjadi karena adanya perbedaan distribusi otoritas dalam masyarakat. Dalam konteks pencalonan Anies, elite politik yang memiliki kekuasaan di pemerintahan pusat lebih memilih untuk mendukung kandidat yang sejalan dengan kepentingan mereka. Ini mengakibatkan proses pencalonan menjadi tidak hanya soal elektabilitas, tetapi juga soal seberapa jauh seorang calon dapat mengakomodasi kepentingan kelompok elite yang berkuasa. Tekanan politik yang datang dari pemerintahan pusat terhadap partai-partai dalam koalisi Anies juga berperan besar dalam kegagalan pencalonannya. Partai-partai yang sebelumnya mendukung Anies akhirnya beralih ke KIM Plus demi mendapatkan akses ke pemerintahan pusat dan sumber daya yang lebih besar. Dalam konteks ini, Dahrendorf menjelaskan bahwa kelompok dominan akan selalu berusaha mempertahankan status quo dengan berbagai cara, termasuk melalui tekanan politik terhadap pihak-pihak yang berseberangan.

Selain itu, teori konflik kepentingan Dahrendorf juga menyoroti bagaimana perbedaan kepentingan dalam struktur sosial dapat memicu ketegangan yang berujung pada perpecahan. Hal ini terlihat jelas dalam dinamika politik yang terjadi dalam koalisi pendukung Anies, di mana partai-partai lebih mengutamakan stabilitas politik nasional dibandingkan dengan memenangkan Pilkada DKI. Konflik internal ini menjadi salah satu penyebab utama mengapa Anies gagal mendapatkan dukungan penuh. Kegagalan Anies juga dapat dijelaskan melalui konsep distribusi otoritas dalam teori Dahrendorf. Otoritas dalam dunia politik tidak hanya ditentukan oleh popularitas seorang kandidat, tetapi juga oleh sejauh mana

kandidat tersebut dapat menyesuaikan diri dengan kepentingan elite yang berkuasa. Dalam kasus ini, Anies dianggap sebagai figur yang tidak cukup dapat dikendalikan oleh elite politik, sehingga pencalonannya menjadi tidak diinginkan oleh kelompok dominan.

Ketidakseimbangan kepentingan dalam koalisi juga menunjukkan bagaimana partai politik lebih cenderung mengutamakan kepentingan jangka panjang mereka. Dalam teori Dahrendorf, konflik antara kelompok dengan otoritas dan kelompok yang tidak memiliki otoritas sering kali berakhir dengan kemenangan kelompok yang lebih kuat. Dalam hal ini, elite politik nasional yang memiliki kekuatan lebih besar berhasil menghambat pencalonan Anies melalui tekanan terhadap partai-partai pendukungnya. Dalam politik, koalisi sering kali hanya bersifat sementara dan didasarkan pada kepentingan pragmatis. Dahrendorf menjelaskan bahwa dalam setiap struktur sosial, akan selalu ada kelompok yang berusaha mempertahankan kekuasaannya dan kelompok lain yang mencoba merebutnya. Dalam kasus Anies, kelompok elite politik yang berkuasa tidak ingin kehilangan dominasi mereka, sehingga mereka mengatur strategi untuk memastikan bahwa calon yang didukung adalah mereka yang dapat dikendalikan.

Salah satu cara yang digunakan untuk menghambat pencalonan Anies adalah dengan memastikan bahwa partai-partai yang awalnya mendukungnya tidak lagi memiliki insentif untuk tetap berada di koalisinya. Dengan menawarkan posisi strategis dalam pemerintahan kepada partai-partai tersebut, elite politik berhasil menarik mereka keluar dari koalisi Anies. Ini menunjukkan bagaimana kepentingan politik dapat dengan mudah berubah tergantung pada peluang yang tersedia. Selain faktor politik, faktor ekonomi juga berperan dalam kegagalan pencalonan Anies. Tanpa dukungan finansial yang kuat, kampanye politik menjadi sulit untuk dijalankan. Dalam teori Dahrendorf, kekuasaan ekonomi sering kali digunakan sebagai alat untuk memperkuat dominasi kelompok tertentu. Dalam hal ini, kandidat yang memiliki akses ke sumber daya ekonomi yang lebih besar cenderung lebih diuntungkan dibandingkan mereka yang tidak. Faktor ekonomi juga mempengaruhi keputusan partai dalam menentukan dukungan mereka. Jika suatu partai merasa bahwa mendukung Anies tidak akan memberikan manfaat ekonomi yang cukup besar, maka mereka lebih memilih untuk berkoalisi dengan pihak yang

dapat memberikan jaminan tersebut. Ini menunjukkan bahwa politik tidak hanya soal visi dan misi, tetapi juga soal bagaimana sumber daya ekonomi didistribusikan dalam sistem politik.

Dalam konteks Pilkada DKJ, faktor lain yang turut mempengaruhi adalah kekhawatiran terhadap stabilitas pemerintahan jika Anies terpilih. Beberapa pihak melihat bahwa kepemimpinan Anies dapat berpotensi menciptakan ketidakstabilan politik, terutama karena posisinya yang dianggap lebih dekat dengan kelompok oposisi. Hal ini membuat elite politik lebih memilih kandidat lain yang dianggap lebih aman secara politik. Konflik kepentingan juga terjadi dalam bentuk negosiasi antar partai politik. Setiap partai memiliki tuntutan dan harapan tertentu yang ingin mereka wujudkan melalui pencalonan gubernur. Jika tuntutan tersebut tidak terpenuhi, maka mereka cenderung untuk menarik dukungan mereka dan mencari opsi lain yang lebih menguntungkan.

Dari perspektif Dahrendorf, konflik dalam politik adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari karena sistem sosial selalu terdiri dari kelompok yang memiliki kepentingan berbeda. Namun, cara kelompok tersebut menyelesaikan konflik akan menentukan apakah sistem tersebut tetap stabil atau mengalami perubahan besar. Dalam kasus Anies, konflik kepentingan yang terjadi menyebabkan perubahan besar dalam peta politik Pilkada DKJ. Menurut Bapak Usamah Abdul Aziz, elite politik memiliki pengaruh besar dalam menentukan siapa yang akan maju dalam kontestasi politik. "Elite politik inilah yang menentukan siapa akan mendukung siapa, dan siapa akan didukung siapa," jelasnya. Ini menunjukkan bahwa struktur kekuasaan dalam partai politik sangat dipengaruhi oleh elite yang memegang kendali keputusan, bukan hanya oleh elektabilitas seorang kandidat.

Kegagalan Anies juga dapat dijelaskan melalui konsep distribusi otoritas dalam teori Dahrendorf. Otoritas dalam dunia politik tidak hanya ditentukan oleh popularitas seorang kandidat, tetapi juga oleh sejauh mana kandidat tersebut dapat menyesuaikan diri dengan kepentingan elite yang berkuasa. Dalam kasus ini, Anies dianggap sebagai figur yang tidak cukup dapat dikendalikan oleh elite politik, sehingga pencalonannya menjadi tidak diinginkan oleh kelompok dominan. Ketidakseimbangan kepentingan dalam koalisi juga menunjukkan bagaimana partai

politik lebih cenderung mengutamakan kepentingan jangka panjang mereka. Dalam teori Dahrendorf, konflik antara kelompok dengan otoritas dan kelompok yang tidak memiliki otoritas sering kali berakhir dengan kemenangan kelompok yang lebih kuat. Dalam hal ini, elite politik nasional yang memiliki kekuatan lebih besar berhasil menghambat pencalonan Anies melalui tekanan terhadap partai-partai pendukungnya.

Menurut Usamah Abdul Aziz, ada upaya sistematis untuk menghalangi pencalonan Anies. "Ada kemufakatan jahat yang ingin bermain-main dengan demokrasi kita," katanya. Ini menunjukkan bahwa ada pihak-pihak yang secara aktif mengatur strategi untuk memastikan bahwa Anies tidak mendapatkan dukungan penuh dari partai-partai politik. Kesimpulannya, teori konflik kepentingan Ralf Dahrendorf membantu menjelaskan bagaimana dinamika politik dan distribusi otoritas dapat mempengaruhi pencalonan seorang kandidat. Kegagalan Anies Baswedan dalam Pilkada DKJ 2024 bukan hanya soal elektabilitas, tetapi juga soal bagaimana kepentingan politik dan ekonomi bekerja dalam struktur kekuasaan yang lebih luas. Dengan memahami faktor-faktor ini, kita dapat melihat bagaimana politik di Indonesia bukan hanya tentang siapa yang paling populer, tetapi juga tentang siapa yang paling mampu menavigasi kepentingan elite yang berkuasa.

## **5.2 Dampak Kegagalan Anies Baswedan Menjadi Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta 2024 Terhadap Peta Koalisi dalam Pilkada Daerah Khusus Jakarta**

Kegagalan Anies Baswedan untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024 memiliki dampak signifikan terhadap peta koalisi politik di Jakarta. Sebelumnya, Anies diusung oleh beberapa partai, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai NasDem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Namun, dinamika politik yang berubah membuat dukungan terhadapnya berkurang. Kegagalan ini menciptakan kekosongan dalam koalisi yang sebelumnya mengandalkan popularitas Anies. Akibatnya, partai-partai tersebut harus mencari calon alternatif untuk memperkuat posisi mereka dalam pemilihan. Dampak dari kegagalan Anies juga terlihat dalam pergeseran aliansi politik. Beberapa partai yang

sebelumnya berkoalisi dengan Anies mulai menjajaki kemungkinan untuk berkolaborasi dengan partai lain. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpastian dalam dukungan terhadap Anies telah memicu perubahan strategi di kalangan partai-partai politik. Koalisi yang terbentuk sebelumnya menjadi tidak stabil, dan partai-partai harus beradaptasi dengan situasi baru ini. Dalam konteks ini, pencarian calon baru menjadi prioritas utama bagi partai-partai tersebut. Dari perspektif koalisi, kegagalan Anies juga dapat memicu pembentukan aliansi baru yang lebih strategis. Partai-partai yang sebelumnya berkoalisi dengan Anies mungkin akan mencari mitra baru untuk memperkuat posisi mereka. Ini dapat menghasilkan kombinasi baru yang lebih efektif dalam menghadapi calon-calon dari partai lain.

Pembentukan aliansi baru ini juga dapat menciptakan dinamika baru dalam pemilihan, di mana partai-partai harus bernegosiasi dan berkompromi untuk mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, kegagalan Anies dapat menjadi titik awal bagi perubahan besar dalam peta politik Jakarta. Sebagai kesimpulan, kegagalan Anies Baswedan untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024 memiliki dampak yang luas terhadap peta koalisi politik. Dari pergeseran aliansi hingga munculnya calon-calon baru, situasi ini menciptakan tantangan dan peluang bagi semua pihak yang terlibat. Kegagalan ini juga dapat memicu refleksi lebih dalam tentang kepemimpinan dan kriteria pemilihan di Jakarta.

Kegagalan Anies Baswedan dalam mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024 membawa dampak signifikan terhadap peta koalisi politik di Jakarta. Dalam konteks teori politik, perubahan arah dukungan partai-partai politik menunjukkan bahwa dinamika koalisi bersifat fleksibel dan sering kali bergantung pada kalkulasi strategis masing-masing partai. Menurut teori koalisi Geoffrey Pridham, partai politik cenderung mencari peluang terbaik untuk mempertahankan pengaruhnya dalam sistem pemerintahan, yang terlihat jelas dalam perubahan peta koalisi pasca kegagalan Anies.

Salah satu dampak utama dari kegagalan Anies adalah pergeseran dukungan partai-partai yang sebelumnya berada dalam koalisinya. Awalnya, PKS, Nasdem, dan PKB menjadi pendukung utama Anies. Namun, setelah keagalannya, partai-partai tersebut beralih ke Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang memiliki kedekatan

dengan pemerintahan pusat. Pergeseran ini mencerminkan pragmatisme politik yang dijelaskan dalam teori koalisi, di mana partai-partai akan mendukung kandidat yang memiliki peluang kemenangan lebih tinggi. Dalam politik Indonesia, hubungan dengan pemerintahan pusat menjadi faktor penentu dalam keputusan partai-partai politik. Partai yang semula mendukung Anies menyadari bahwa tanpa akses terhadap kekuasaan eksekutif, posisi mereka dalam sistem politik akan melemah.

Oleh karena itu, mereka lebih memilih bergabung dengan koalisi yang memiliki potensi kemenangan lebih besar, dibandingkan tetap mendukung kandidat yang tidak mendapatkan tiket pencalonan. Selain itu, perubahan peta koalisi juga menunjukkan bahwa koalisi yang terbentuk di awal tidak selalu solid. Dalam penelitian Ulfa Umayasari (2018) mengenai dinamika koalisi di Pilkada Pringsewu, ditemukan bahwa kepentingan jangka pendek sering kali lebih berpengaruh dibandingkan dengan kesetiaan terhadap kandidat tertentu. Hal yang sama terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta, di mana partai-partai yang sebelumnya mendukung Anies akhirnya bergabung dengan koalisi yang lebih menguntungkan secara elektoral.

Dampak lainnya adalah munculnya konfigurasi politik baru di Jakarta. Dengan bergabungnya PKS, Nasdem, dan PKB ke dalam KIM, keseimbangan kekuatan politik di Jakarta menjadi berubah. Partai-partai yang sebelumnya menjadi oposisi terhadap pemerintahan pusat kini masuk dalam barisan partai pendukung, yang berimplikasi pada perubahan strategi kampanye dan distribusi sumber daya politik. Perubahan ini juga mempengaruhi strategi kandidat lain yang akan bertarung di Pilkada DKI Jakarta. Dengan tidak adanya Anies sebagai pesaing kuat, kandidat-kandidat lain memiliki peluang lebih besar untuk menarik dukungan dari kelompok pemilih yang sebelumnya mendukung Anies. Dalam konteks politik elektoral, perubahan koalisi ini dapat memperkuat posisi kandidat yang didukung oleh partai-partai besar.

Dalam perspektif teori elite C. Wright Mills, kegagalan Anies juga menunjukkan bagaimana elite politik memainkan peran besar dalam menentukan hasil kontestasi pemilu. Para elite partai memutuskan untuk menarik dukungan

mereka setelah mempertimbangkan faktor kepentingan jangka panjang dan hubungan dengan pemerintahan pusat. Dengan demikian, kegagalan Anies bukan hanya disebabkan oleh faktor internal, tetapi juga oleh keputusan elite politik yang lebih luas. Selain itu, kegagalan Anies juga berdampak pada persepsi publik terhadap partai-partai politik yang sebelumnya mendukungnya. Basis pemilih Anies yang loyal mungkin merasa kecewa dengan keputusan partai-partai tersebut untuk beralih dukungan. Hal ini dapat memengaruhi elektabilitas partai-partai tersebut di pemilu legislatif berikutnya, terutama di kalangan pemilih yang menginginkan perubahan politik.

Dalam konteks strategi politik, perubahan peta koalisi juga berpengaruh terhadap alokasi sumber daya kampanye. Dengan bergabungnya lebih banyak partai ke dalam KIM, sumber daya finansial dan logistik mereka dapat lebih terfokus untuk memenangkan kandidat yang mereka dukung. Ini memperlihatkan bagaimana pragmatisme politik menjadi faktor utama dalam perubahan arah dukungan partai. Lebih lanjut, kegagalan pencalonan Anies juga mencerminkan bahwa dalam politik, popularitas saja tidak cukup untuk menjamin dukungan partai. Hasil survei dari Indikator Politik Indonesia dan Litbang Kompas menunjukkan bahwa Anies memiliki elektabilitas tinggi, tetapi karena tidak memiliki dukungan politik yang kuat, ia tetap gagal maju. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan politik tidak hanya ditentukan oleh dukungan publik, tetapi juga oleh dinamika internal partai politik.

Perubahan peta koalisi juga berimplikasi pada arah kebijakan yang akan diterapkan di Jakarta setelah Pilkada 2024. Dengan dominasi partai-partai yang memiliki hubungan erat dengan pemerintahan pusat, kebijakan daerah kemungkinan akan lebih selaras dengan kebijakan nasional. Hal ini dapat mengurangi potensi oposisi di tingkat daerah, tetapi juga bisa menimbulkan kekhawatiran terkait kurangnya check and balance dalam pemerintahan daerah.

Selain itu, perubahan ini juga dapat berpengaruh terhadap mekanisme pengambilan keputusan di DPRD DKI Jakarta. Dengan bergabungnya lebih banyak partai ke dalam satu koalisi besar, oposisi di DPRD menjadi lebih lemah. Hal ini

dapat mempengaruhi dinamika legislasi dan pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Dalam politik elektoral, perubahan peta koalisi juga menunjukkan bahwa partai-partai kecil cenderung mengikuti arah yang ditentukan oleh partai besar. Dalam teori koalisi Pridham, partai kecil biasanya bergabung dengan koalisi yang memiliki potensi kemenangan lebih besar agar tetap relevan dalam sistem politik. Fenomena ini terlihat dalam Pilkada DKI Jakarta, di mana partai-partai kecil cenderung mengikuti keputusan partai-partai besar dalam menentukan arah dukungan mereka.

Kegagalan Anies juga menandai bahwa dalam politik lokal, keputusan politik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor daerah, tetapi juga oleh strategi politik di tingkat nasional. Partai-partai yang awalnya mendukung Anies akhirnya lebih memilih menjaga hubungan baik dengan pemerintahan pusat karena pertimbangan jangka panjang dalam politik nasional.

Selain dampak elektoral, perubahan peta koalisi ini juga dapat mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam politik. Pemilih yang sebelumnya aktif mendukung Anies mungkin merasa apatis terhadap proses politik karena kecewa dengan keputusan partai-partai yang sebelumnya mendukungnya. Hal ini dapat berdampak pada tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada DKI Jakarta.

Dari perspektif institusional, kegagalan Anies juga menunjukkan bahwa regulasi pemilu dan persyaratan pencalonan dapat digunakan sebagai alat untuk memengaruhi peta politik. Partai-partai yang memiliki akses lebih besar terhadap proses legislasi dapat memanfaatkan aturan pemilu untuk memastikan bahwa hanya kandidat yang mereka dukung yang dapat maju.

Secara keseluruhan, kegagalan Anies dalam mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta membawa dampak besar terhadap struktur politik dan dinamika koalisi di Jakarta. Perubahan arah dukungan partai mencerminkan bahwa dalam politik, kepentingan strategis lebih dominan dibandingkan dengan kesetiaan terhadap kandidat tertentu. Dengan demikian, dampak dari kegagalan Anies tidak hanya terasa dalam Pilkada 2024, tetapi juga dapat mempengaruhi dinamika politik

di Jakarta dalam jangka panjang. Hal ini menjadi pelajaran penting bahwa dalam sistem politik Indonesia, strategi koalisi dan kalkulasi politik partai lebih berperan dalam menentukan hasil pemilu dibandingkan dengan faktor elektabilitas seorang kandidat.

